

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 6, Juli 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8132149>

Objek Materia Pemerintah Daerah Ditinjau Dengan Model Efektivitas Sistem Terbuka

Hamdun Hibatuloh¹, Randi Dwi Cahya Fitriyadi², Arkan³, Elang Dinar Putra Anggriawan⁴, Thoriq Hamimi Setiawan⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Nasional

Email : ³arkanmoreno97@gmail.com

Abstrak

Pemerintah daerah memiliki objek materia yang beragam, seperti sumber daya alam, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan filsafat administrasi publik dengan model sistem terbuka, objek materia pemerintah daerah harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Hal yang menjadi fokus pemerintah adalah prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan objek materia pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan objek materia tersebut dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan objek materia pemerintah daerah, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah dan Sistem Terbuka.

Abstract

Local governments have various material objects, such as natural resources, infrastructure, education, health, and so on. In a review of the philosophy of public administration with an open system model, regional government material objects must be managed in a transparent and accountable manner. What the government focuses on are principles transparency and accountability in the management of regional government material objects. It is so it is important to ensure that the management of such materia objects is carried out in a manner that honest, open and responsible. In managing regional government material objects, the community must be actively involved and given the opportunity to express their opinions.

Keywords : Local Government and Open Systems.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh filsafat administrasi publik dengan model terbuka.

Model efektifitas sistem terbuka adalah suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dalam model ini, pemerintah daerah dianggap sebagai bagian dari sistem terbuka yang terdiri dari berbagai elemen seperti masyarakat, bisnis, dan organisasi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan interaksi dan hubungan dengan elemen-elemen tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Objek materia pemerintah daerah meliputi berbagai hal seperti anggaran, kebijakan, program, dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi berarti bahwa pemerintah daerah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang

kebijakan dan program yang dilaksanakan. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang dilaksanakan serta harus siap menerima kritik dan saran dari masyarakat. Partisipasi masyarakat berarti bahwa pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam model efektifitas sistem terbuka, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi interaksi dan hubungan antara elemen-elemen dalam sistem terbuka untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengamati fenomena, yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi masyarakat dan rendahnya pelayanan publik yang diterima masyarakat lokal akibat tidak efektifnya organisasi masyarakat. Kedua gejala atau fenomena inilah yang menjadi fokus temuan dan tujuan kajian penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan model untuk efektifitas pemerintah daerah. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk menemukan dan memahami proses dimana organisasi pemerintah daerah meningkatkan salah satu tugas utamanya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kepada masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan alat untuk mendeskripsikan dan memahami pandangan individu dan kelompok terhadap masalah sosi masalah sosial atau individu.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan organisasi yang dibentuk secara formal untuk menyelenggarakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah. Susunan organisasi dari Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah.

Teknik atau Strategi Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Adapun strategi penelitian yang digunakan adalah "*grounded theory*", yaitu strategi penelitian yang di dalamnya Peneliti menghasilkan teori umum (generalisasi dari suatu proses, aksi atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Efektivitas

Efektivitas umumnya dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan operasional dan fungsional. Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan dan seberapa baik seseorang mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan dianggap efektif dalam hal waktu, tenaga dan lain-lain. Efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah mengukur bagaimana pemerintah kota dapat melaksanakan, mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kota dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama keterkaitan antara struktur negara dan pemerintahan daerah, kemampuan dan berbagai perbedaan daerah, peluang dan tantangan, serta dengan mendistribusikan kekuasaan antar daerah sebesar-besarnya dengan pemberian hak dan

kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan.

Ketika seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, itu berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan yang ditentukan dalam waktu dengan penggunaan sumber daya khusus yang digunakan, dan tujuan konkret harus ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber-sumber ini. hasilnya harus dicapai dalam hal apa pun dalam waktu tertentu (S.P. Siagian, 2005).

Efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kinerja organisasi harus mampu menggambarkan semua siklus input dan proses-output serta menggambarkan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sementara itu, berdasarkan teori dimensi temporal, organisasi didefinisikan sebagai elemen dari sistem (lingkungan) yang lebih besar, melewati waktu yang berbeda mengambil sumber daya, memprosesnya dan akhirnya menjadi barang yang akan dikembalikan kepada lingkungannya.

Ilmu Pemerintah

Ilmu pemerintah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan objek materi pemerintah daerah, termasuk sumber daya alam, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, ilmu pemerintah tidak hanya mempelajari tentang pengelolaan objek materi tersebut secara teknis, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan politik yang terkait dengan pengelolaan tersebut. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam ilmu pemerintah adalah prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan objek materi pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan objek materi tersebut dilakukan dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan objek materi tersebut dilakukan dan hasilnya seperti apa.

Pengelolaan objek materi pemerintah daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ilmu pemerintah sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan objek materi tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan prinsip keberlanjutan. Melalui pengelolaan objek materi yang baik, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ilmu pemerintahan memiliki tujuan materi negara dalam pikiran dan karena itu memusatkan perhatiannya pada hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, gejala pemerintah dalam masyarakat, dan peristiwa dalam pemerintahan. Objek materi adalah ilmu yang menjelaskan suatu masalah secara umum atau global. Atau dapat diartikan sebagai objek material penelitian, pemikiran atau penelitian ilmiah. Objek materi didefinisikan sebagai bahan yang memberikan gambaran tentang penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek materi juga berarti hal-hal yang diperiksa, dilihat, atau ditekankan oleh disiplin ilmu. Objek materi mencakup segala sesuatu, baik yang konkret maupun abstrak, material dan non-material. Itu juga bisa berupa masalah, masalah, ide, konsep, dll. Contoh: Objek material administrasi negara, ilmu politik, ilmu politik adalah negara.

Model Sistem Terbuka dalam Objek Materi Pemerintah Daerah

Model sistem terbuka mencakup tiga komponen dasar yaitu masukan, pengolahan, dan keluaran. Masukan dipengaruhi oleh lingkungan ekstrem, masukan diubah menjadi bermacam-macam keluaran yang akan dikeembalikan lagi pada lingkungan (Steer, 1985). Pemerintah daerah memiliki objek materi yang beragam, seperti sumber daya alam, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan filsafat administrasi publik dengan model sistem terbuka, objek materi pemerintah daerah harus dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Model terbuka dalam filsafat administrasi publik mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa objek materia yang mereka kelola dapat diakses oleh masyarakat dan informasi mengenai pengelolaannya dapat diakses secara mudah. Model sistem terbuka dalam pengelolaan objek materia pemerintah daerah dapat diaplikasikan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- 1) Analisis kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia untuk menentukan prioritas pengelolaan objek materia pemerintah daerah yang akan dilakukan. Hal ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka dan memberikan masukan tentang sumber daya yang tersedia.
- 2) Pengembangan program dan rencana aksi. Setelah melakukan analisis kebutuhan, pemerintah daerah perlu mengembangkan program dan rencana aksi yang spesifik untuk pengelolaan objek materia pemerintah daerah. Program dan rencana aksi ini harus mencakup tujuan, strategi, anggaran, serta indikator kinerja yang jelas.
- 3) Pelaksanaan program dan rencana aksi. Setelah program dan rencana aksi disusun, pemerintah daerah perlu melaksanakan program dan rencana aksi tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaannya. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pengelolaan objek materia dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 4) Evaluasi dan penilaian kinerja. Setelah program dan rencana aksi dilaksanakan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan penilaian kinerja untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Evaluasi dan penilaian kinerja ini harus melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan dan saran untuk perbaikan ke depannya.
- 5) Perbaikan dan pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan pengembangan program dan rencana aksi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan objek materia pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perbaikan dan pengembangan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan objek materia pemerintah daerah, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus dipegang teguh. Hal ini dapat diimplementasikan dengan mengacu pada berbagai pedoman dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga dapat dipelajari dari praktik terbaik dan pengalaman dari pemerintah daerah lain yang telah berhasil dalam pengelolaan objek materia mereka. Dengan menerapkan model sistem terbuka dalam pengelolaan objek materia pemerintah daerah, diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik dan efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Objek materia pemerintah daerah meliputi berbagai hal seperti anggaran, kebijakan, program, dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi berarti bahwa pemerintah daerah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan sehingga kritik dan saran dari pembaca kepada penulis sangat dibutuhkan untuk perbaikan penyusunan kedepannya.

Referensi

- Azhar Kazim. (1983). *Administrative Effectiveness and Efficiency: A Comparative Study of Public Administration in the United States and Pakistan*. Lahore, Vanguard.
- Faried Ali. (2004). *Filsafat Administrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aman Ma'arij, Sukirman. "Implikasi Yuridis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020